

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Afrika (*African Union*) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 2002. Organisasi ini adalah penerus dari Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity*), atau organisasi antar-pemerintah untuk negara-negara Afrika yang didirikan pada tahun 1963 dan bekerja untuk membawa negara-negara Afrika mendapatkan dan memperkuat kemandirian mereka dari Negara-negara Eropa yang telah memerintah mereka dengan kekerasan selama beberapa dekade. OAU dibuat dengan tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara anggota dan memperkuat suara Afrika di kancah internasional.¹

Dengan berakhirnya Perang Dingin, pembebasan akhir dari Afrika Selatan, dan terbentuknya kembali Afrika di panggung politik internasional, maka para kepala negara di Afrika mengakui bahwa kerangka OAU tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan Afrika dalam mengkoordinasi kebijakan benua yang lebih besar dan menumbuhkan perekonomian yang lebih pesat.² Maka pada 9 Juli 2002, terbentuklah Uni Afrika yang digelar di Durban, Afrika Selatan. Tujuannya

1 Diedre L Badejo. 2008. *The African Union*. New York: Chelsea House.

2 <http://africasd.iisd.org/institutions/african-union-au/> diakses pada 22 April 2015 Pukul 15:40

adalah untuk mencapai persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika yang lebih besar; mempromosikan dan membela posisi Afrika di kancah global; mendorong kerjasama internasional; membangun kondisi yang memungkinkan untuk Afrika agar dapat memainkan peran yang sah dalam perekonomian global dan dalam negosiasi internasional; mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi di Afrika; memajukan pembangunan benua melalui penelitian di segala bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; juga menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian.³

Pada tahun 2011 salah satu negara anggota Uni Afrika yaitu Libya menjadi fokus penting dari isu keamanan di Afrika, karena selain Libya merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, konflik ini juga dapat memicu tersebarnya virus demokratisasi ke negara-negara lain di kawasan Afrika dan akan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Afrika jika tidak segera diatasi.

Krisis Libya tahun 2011 atau yang dikenal dengan perang sipil Libya tahun 2011 adalah konflik yang merupakan bagian dari isu *Arab Spring* atau Musim Semi Arab. Perang ini diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang

3 OSISA and Oxfam. 2010. *Strengthening Popular Participation in the African Union. A Guide to AU Structures and Processes.*

dimulai kurang lebih akhir Februari silam.⁴ Perang ini juga mengakibatkan ribuan warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti-pesawat dan roket. Namun, banyak warga dilaporkan terperangkap di lokasi pertempuran itu.⁵ Perang sipil Libya juga merupakan salah satu revolusi sosial-politik yang terjadi di Jazirah Arab bersama-sama dengan Tunisia dan Mesir. Kasus ini bukan terjadi secara eforia, yaitu adanya dependensi antara negara dengan negara lain pada satu kawasan yang sama, namun dilatarbelakangi oleh berbagai problematika yang kompleks.

Terjadinya krisis Libya tahun 2011 ternyata tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan posisi yang paling rasional sebagai *stakeholder* pemerintah Libya, sekaligus pembuat kebijakan tertinggi di Libya, yaitu presiden. Dalam sepanjang sejarah pemerintahan Libya sistem perimbangan kekuasaan di negara ini di dominasi oleh bidang eksekutif saja, sedangkan lembaga legislatif dan eksekutif tidak lepas dari pengaruh eksekutif (presiden).

Dalam sepanjang pemerintahan Libya rezim Moammar Qaddafi begitu mendominasi pemerintahan. Ini salah satunya diwujudkan melalui manipulasi pada pemilu-pemilu untuk melanggengkan 'status quonya'. Keberadaan masyarakat Libya dan elemen-elemen pendukungnya yang sebenarnya dapat

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Libya diakses pada 19 Mei 2015 Pukul 15:42

5 <http://www.voaindonesia.com/content/libya-dilanda-konflik-terparah-sejak-2011/1961696.html> diakses pada 19 Mei 2015 Pukul 16:05

menjadi kontrol pemerintah mengalami kebuntuan fungsi karena sistem pemerintahan yang dijalankan secara tertutup dengan ‘tangan besi’ (otoriter).

Pada tahun 2011 kondisi sosial-politik Libya mengalami destabilisasi yang berujung pada terjadinya krisis yang dikenal dengan perang sipil Libya tahun 2011. Kasus ini menimbulkan kerugian perekonomian serius bagi Libya, selain itu, krisis Libya tahun 2011 juga menyebabkan korban jiwa, baik dari pihak pemerintah ataupun kelompok demonstran anti pemerintah yang kemudian berujung pada jatuhnya rezim Moammar Qaddafi.⁶

Dari sudut diplomatik, Qaddafi menawarkan perundingan dengan pemimpin oposisi melalui perwakilannya namun para pemberontak dengan lantang menolaknya. Mereka berjanji untuk terus berjuang hingga Qaddafi benar-benar mengundurkan diri atau dikalahkan secara militer. Situasi kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata, dengan pemberontak mendirikan koalisi bernama National Transitional Council atau Dewan Transisi Nasional yang berbasis di Benghazi.

The International Criminal Court atau Pengadilan Pidana Internasional telah memperingatkan Qaddafi bahwa ia dan anggota pemerintahannya terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷ Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional mengutuk kekerasan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil di Libya dan pada 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB dengan

6 Agus Siyadi. 2012. Latar Belakang Perang Sipil di Libya Tahun 2011. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

7 Landen Garlan. 2012. 2011 Libyan Civil War. New Delhi: White Word Publications.

suara bulat sepakat untuk merujuk situasi yang sedang berlangsung di Libya untuk Mahkamah Pidana Internasional, memberlakukan embargo pada Libya Arab Jamahiriya itu, termasuk penyediaan personil tentara bayaran, membekukan aset keuangan Muammar Qaddafi dan anggota keluarga tertentu, juga memberlakukan larangan perjalanan pada Qaddafi, anggota keluarga tertentu dan penasihat senior.

Dengan adanya krisis ini maka Uni Afrika sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika serta berwenang untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara – negara Afrika, harus memiliki kontribusi terhadap penyelesaian konflik di Libya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah untuk di analisa yaitu :

”Bagaimana upaya Uni Afrika menyelesaikan konflik di Libya pada tahun 2011-2012?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana upaya Uni Afrika terhadap konflik di Negara Libya pada tahun 2011-2012, penulis mencoba untuk menerapkan beberapa konsep maupun teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Konsep Organisasi Internasional dan Teori Resolusi Konflik.

1. Konsep Organisasi Internasional

Untuk mengetahui peran Uni Afrika terhadap konflik di Libya, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang konsep Uni Afrika sebagai organisasi internasional. Michael Wallace dan David Singer mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

“Sebuah organisasi internasional harus terdiri dari setidaknya dua anggota (Negara) yang memenuhi syarat dari sistem internasional dan telah diciptakan oleh instrumen formal dalam kesepakatan antara pemerintah negara-negara nasional. Selain itu organisasi internasional harus mengadakan sesi pleno lebih atau kurang teratur pada interval tidak lebih besar dari satu dekade dan memiliki permanen sekretariat dengan markas permanen dan yang melakukan tugas yang sedang berlangsung.”⁸

Sedangkan menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional adalah:

“Suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”.⁹

Uni Afrika muncul sebagai wadah yang mewakili suara para negara anggotanya. Walaupun memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan intervensi militer dengan tujuan untuk mengurangi pertikaian yang timbul, konflik Libya tahun 2011 telah menjadi contoh kasus yang berbeda. Uni Afrika sama sekali tidak menggunakan intervensi militer melainkan lebih jauh menolak adanya intervensi militer asing untuk mengurangi pertikaian yang timbul dan mempromosikan perdamaian di kawasan Afrika.

8 Wallace and Singer. 1970. *Intergovernmental Organization 1815-1964*. The MIT Press. Vol.24, No.2, Hal. 245-246.

9 Sumaryo Suryokusumo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : UI-Press, Hal. 48.

Kebijakan ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diambil kebanyakan aktor internasional. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri telah mengeluarkan resolusi 1970 dan 1973 yang mengisyaratkan digunakannya segala cara untuk menyelesaikan konflik. NATO dengan kapabilitasnya kemudian menterjemahkan resolusi ini untuk melakukan intervensi militer. Uni Afrika sendiri membentuk komite sementara dan mengupayakan *political roadmap* sebagai bentuk solusi yang ditawarkan kepada pihak bertikai yang diwakili pemerintahan Qaddafi dan pihak oposisi yang diwakili oleh *National Transitional Council* (NTC).¹⁰

Menurut Leroy Bennet, secara umum Organisasi internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Organisasi permanen yang memiliki beberapa fungsi yang sifatnya berkelanjutan.
- b. Keanggotannya bersifat sukarela dan setiap anggotanya memiliki kedudukan yang sama.
- c. Memiliki alat atau perangkat yang memiliki dasar tujuan yang sama, memiliki struktur yang jelas dan sistem metode operasi yang sistematis.
- d. Setiap negara memiliki posisi yang terwakilkan dalam setiap konferensi tingkat organisasi antar negara anggota.

¹⁰ <http://eprints.upnyk.ac.id/747/1/Abstrak%20Skripsi%20Rafhael%20Riando%20Rumampuk%20%28151090283%29.pdf> diakses pada 08 Desember 2015 Pukul 23:07

e. Memiliki sekretariat yang bersifat permanen untuk menyelesaikan berbagai masalah administrasi, melakukan penelitian berbagai kasus dan wadah informasi bagi anggota-anggotanya yang berdaulat.¹¹

Ciri-ciri tersebut telah hadir dalam tubuh Uni Afrika. Yang pertama, organisasi permanen yang memiliki beberapa fungsi yang sifatnya berkelanjutan hal ini dibuktikan dengan fungsi Uni Afrika untuk mencapai persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika yang lebih besar; mempromosikan dan membela posisi Afrika umum tentang isu-isu; mendorong kerjasama internasional; membangun kondisi yang memungkinkan untuk benua untuk memainkan peran yang sah dalam ekonomi global dan dalam negosiasi internasional; mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi di Afrika.¹²

Kedua, Keanggotannya bersifat sukarela dan setiap anggotanya memiliki kedudukan yang sama dimana Uni Afrika yang sejak awal pembentukannya sudah memiliki 53 negara anggota. Hingga sekarang Uni Afrika telah mengakui Sudan Selatan sebagai anggota ke-54 blok itu, yang menandai pengakuan lain bagi negara terbaru di dunia tersebut.¹³ Meskipun Sudan Selatan adalah negara yang

11 A. Leroy Bennet. 1977. *International Organizations Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall.

12 <http://www.au.int/en/about/nutshell> diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 01:08

13

<http://internasional.kompas.com/read/2011/07/30/11362110/Sudan.Selatan.Jadi.Anggota.Uni.Afrika> diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 1:15

belum lama merdeka, namun hal ini menandakan bahwa Uni Afrika tidak membedakan negara manapun untuk ikut serta dalam organisasi Uni Afrika.

Ketiga, memiliki alat atau perangkat yang memiliki dasar tujuan yang sama, memiliki struktur yang jelas dan sistem metode operasi yang sistematis. Uni Afrika memiliki tujuan yang sama yaitu menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi. Misi utama dari Uni Afrika yang relatif baru adalah menciptakan kesatuan yang lebih besar dan kerjasama antar negara-negara anggota dan di antara bangsa Afrika dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan di benua.¹⁴ Adapun struktur Uni Afrika terdiri dari: *the Assembly of the Union* atau Majelis (yang menentukan kebijakan umum); *the Executive Council* atau Dewan Eksekutif (yang berkoordinasi dan membuat keputusan tentang kebijakan umum); *the Pan-African Parliament* atau Parlemen Pan Afrika (yang menerapkan kebijakan); *the Court of Justice* atau Pengadilan Kehakiman (memastikan kepatuhan dengan hukum); *the Commission* atau Komisi (Sekretaris); *the Permanent Representatives Committee* atau Wakil Komite Tetap (yang membantu Dewan Eksekutif); *the Specialized Technical Committees* atau Komite khusus Teknis (membantu Dewan Eksekutif dalam hal substantif); *the Economic, Social and Cultural Council* atau Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya; *the Peace and Security Council* atau Dewan Perdamaian dan Keamanan (yang membuat keputusan tentang pencegahan konflik, manajemen dan resolusi konflik); dan yang terakhir adalah *the Financial Institutions* atau Lembaga

¹⁴ <http://refernsipolitikdan hukum.blogspot.com/2011/05/analisis-organisasi-internasional.html> diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 1:22

Keuangan (terdiri dari *Afrika Central Bank* atau Bank Sentral Afrika, *the African Monetary Fund*, dan *the African Investment Bank* atau Bank Investasi Afrika).¹⁵

Keempat, setiap negara memiliki posisi yang terwakilkan dalam setiap konferensi tingkat organisasi antar negara anggota. Hal ini dapat dilihat ketika adanya *Ordinary Session* ke-12 dimana Majelis bertemu pada tanggal 1-3 Februari di Addis Ababa, Ethiopia. Dalam keputusan dan deklarasi, Majelis sangat menolak kudeta yang terjadi di Mauritania dan Guinea pada tahun 2008, dan menegaskan kembali dukungannya untuk Deklarasi Sirte pada reformasi Dewan Keamanan PBB. Pada pertemuan yang sama juga, pemimpin Libya, Moammar Qaddafi, terpilih menjadi pemimpin Uni Afrika pada Senin 2 Februari 2009. Posisi tersebut sudah lama dinantikan oleh pemimpin Negara Libya demi mengangkat Libya di mata internasional setelah mengalami isolasi selama bertahun-tahun.¹⁶ Dan dapat dilihat juga pada tanggal 16 Mei 2009, Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengadakan pertemuan bersama dengan Dewan Keamanan PBB di Markas Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia. Pertemuan difokuskan terutama pada situasi di Darfur, Sudan, tetapi juga membahas diskusi tentang isu-isu mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi dan aturan hukum di Afrika.¹⁷

15 <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/au.pdf> diakses pada 05 Juni Pukul 1:48

16 http://dunia.news.viva.co.id/news/read/26648/gadhafi_pimpin_uni_afrika diakses pada 05 Juni Pukul 1: 58

17 <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/au.pdf> diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 2:41

Ciri yang kelima yaitu, memiliki sekretariat yang bersifat permanen untuk menyelesaikan berbagai masalah administrasi, melakukan penelitian berbagai kasus dan wadah informasi bagi anggota-anggotanya yang berdaulat. Uni Afrika memiliki sekretariat di Addis Ababa, Ethiopia. Adanya penelitian dalam berbagai kasus di Afrika, salah satunya adalah pada KTT Uni Afrika ke-20 pada 21-28 Januari 2013 yang membahas mengenai kasus perubahan iklim di Afrika, pembentukan Pengadilan Konstitusional Internasional atau *International Constitutional Court*, tingkat kematian anak dan ibu, juga kasus HIV / AIDS.¹⁸

2. Teori Resolusi Konflik

Menurut John W Burton, resolusi konflik merupakan “Suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan”.¹⁹

Konsep *conflict resolution* atau resolusi konflik lahir atas dasar bagaimana manusia sebagai makhluk yang hidup secara sosial memiliki tuntutan untuk dapat saling menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Conflict resolution* atau resolusi konflik ini sendiri muncul setelah bermunculannya konflik, yang berakibat pada terjadinya peperangan, kekerasan dan berjatuhnya korban. Pada dasarnya,

18 <http://summits.au.int/en/20thsummit/events/summit-ends-strong-decisions-and-declarations-au-heads-states-crucial-and-topical-> diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 2:56

19 John W Burton. 1990. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martins Press Inc.

manusia sebagai makhluk sosial berpotensi untuk berkonflik, karena adanya perbedaan, kompetisi, dan kepentingan dari banyak pihak yang terlibat.²⁰

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat dihiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.²¹

Peter Wallenstein berpendapat bahwa, resolusi konflik mengandung tiga prinsip penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini sangat penting karena tanpa pengakuan tersebut, mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa

²⁰ http://www.academia.edu/7143010/Kajian_Perdamaian diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 0:15

berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.²²

Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Peter Wallensteen mengenai adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak, dapat dilihat ketika langkah Uni Afrika dalam menegosiasikan dan membahas mengenai kesepakatan *political roadmap* (peta jalan politik) yang ditawarkan oleh *The High Ad hoc Committee* atau Komite Tinggi Ad hoc kepada para pemangku kepentingan di Libya.

Uni Afrika mengumumkan bahwa otoritas Libya telah setuju dengan roadmap yang dibentuk oleh Komite ad hoc Tingkat Tinggi AU untuk mengatasi krisis di Libya. Peja Jalan itu terdiri atas unsur-unsur berikut: Pertama, perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan. Kedua, bantuan kemanusiaan untuk para korban baik Libya dan pekerja migran asing, terutama dari Afrika. Ketiga, prakarsa dialog politik antara pihak-pihak Libya guna mencapai kesepakatan modalitas untuk mengakhiri krisis. Keempat, pembentukan dan pengelolaan suatu periode transisi inklusif. Terakhir, kelima, penerapan dan pelaksanaan reformasi politik yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi rakyat Libya

21 <https://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik-2/> diakses pada 04 Juni 2015 Pukul 23:54

22 Peter Wallensteen. 2002. *Understanding Conflict Resolution War, Peace, and the Global System*. London: SAGE Publications. Hal. 74-75.

Kepentingan dari keterlibatan Uni Afrika sebagai organisasi internasional adalah untuk mencegah menyebarnya virus *Arab Spring* di kawasan Afrika. Karena faktor eksternal konflik di Libya dipicu oleh konflik yang terjadi di Tunisia dan Mesir (dilihat dari pola konflik yang hampir sama). Dimana konflik yang terjadi di Tunisia dipicu oleh aksi protes yang dilakukan oleh seorang pedagang kaki lima bernama Mohamed Bouazizi pada 17 Desember 2010 dengan cara membakar diri untuk melawan rezim Ben Ali yang dianggap sudah terlalu lama berkuasa, dan konflik mesir yang bermula pada pertengahan Januari 2011 ketika massa mengadakan demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Sedangkan faktor internal konflik Libya adalah kejenuhan rakyat terhadap kepemimpinan Qaddafi yang berkuasa selama lebih dari 40 tahun.²³

Selain itu, Uni Afrika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan stabilitas pasokan minyak dan gas dunia. Libya sebagai negara penghasil minyak terbesar ke-9 di dunia dan negara yang paling kaya minyak di Afrika yang mengalami krisis politik, tentunya akan berimplikasi pada stabilitas energi dunia. Apalagi, negara-negara Afrika tentunya secara signifikan merasakan implikasi tersebut.²⁴

Prinsip kedua yaitu setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Dalam hal ini, peran Uni Afrika adalah sebagai salah satu subjek dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Afrika, telah

²³ *Faktor Penyebab Konflik di Mesir*, terdapat pada website: <http://komahi.umy.ac.id/2011/04/17/faktor-penyebab-konflik-di-mesir/> diakses pada 6 Januari 2016 Pukul 1:07

²⁴ http://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/politik-kepentingan-dalam-krisis-libya_550d6392813311572cb1e291 diakses pada 05 Juni 2015 Pukul 4:21

terlihat jelas melalui peranan Dewan Keamanan dan Perdamaian (*Peace and Security Council*) yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian, keamanan, pencegahan dan pengelolaan konflik. PSC berwenang dalam mengintervensi dan mengatasi konflik-konflik tersebut dalam bentuk diplomasi, peringatan, suspensi, sanksi dan misi perdamaian dan pemeliharaan di Afrika.²⁵ Uni Afrika sebagai organisasi yang mewakili Kawasan Afrika mampu menerima kehadiran aktor internasional lain dan bekerjasama dalam upaya penyelesaian krisis Libya dengan Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan negara-negara tetangga.

Prinsip ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan. Tujuan utama Uni Afrika adalah untuk menghindari perang. Sebagai organisasi regional, diplomasi adalah senjata utama Uni Afrika dan penggunaan kekuatannya maka penggunaan kekerasan selalu menjadi jalan terakhir ketika semua pilihan lain telah habis. Jika Libya stabil dan demokratis maka hal itu akan menjadi aset luar biasa bagi benua Afrika. Sebaliknya, jika Libya tidak stabil maka akan mempengaruhi lingkungan Afrika dan sekitarnya.

Oleh karena itu ketika Uni Afrika menawarkan *roadmap* dan pihak Libya menyetujuinya, hal itu termasuk kedalam proses pembangunan rasa saling percaya. Ketika konflik Libya telah berakhir dengan kematian Moammar Qaddafi,

²⁵ http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56471 diakses pada 04 Juni 2015 Pukul 7:42

dan Libya membuka lembaran baru, maka pada tanggal 20 Agustus 2011 Uni Afrika mengakui NTC (*National Transitional Council of Libya*) sebagai wakil dari rakyat Libya karena mereka membentuk pemerintahan transisi inklusif. Selain itu, mengingat jaminan resmi yang disediakan oleh NTC dan dengan mempertimbangkan keunikan situasi di Libya, pemerintah sementara memiliki wewenang untuk menduduki kursi Libya di AU. Hal itu juga membuat Uni Afrika bersedia mendirikan kantor penghubung AU di Tripoli untuk membantu menstabilkan situasi di negara itu, mempromosikan rekonsiliasi nasional dan memfasilitasi proses transisi.²⁶

D. **Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan dan telah dijelaskan, maka hipotesa yang dapat dirumuskan dari upaya Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di Libya tahun 2011-2012 adalah: melalui penyusunan *political roadmap* untuk mengurangi konflik yang timbul, serta mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan seperti: identitas dan pengakuan NTC juga perubahan institusi yang diperlukan.

1. **Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dinamika konflik di Libya pada tahun 2011-2012
2. Mengetahui upaya Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di Libya pada tahun 2011-2012

²⁶ <http://www.pambazuka.net/en/category.php/aumonitor/78691> diakses pada 10 Juni 2015 Pukul 00.59

2. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya adalah pada tahun 2011-2012 ketika konflik di Libya berlangsung. Namun data dan informasi yang berada diluar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan selama masih dianggap layak untuk digunakan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk memaparkan peran Uni Afrika terhadap konflik di Libya tahun 2011, dimana pemberontakan terhadap rezim Moammar Qaddafi dimulai. Para demonstran terlibat dalam bentrokan berdarah dengan pendukung Qaddafi dan polisi. Sepuluh hari kemudian tidak ada pemerintahan yang tersisa di Benghazi.²⁷ Hingga pada tahun 2012, ketika GNC (*General National Congress*) terpilih dalam pemilihan umum Libya menggantikan NTC (*National Transitional Council*).

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁷ <http://www.dw.com/en/libya-chronology-of-a-revolt-against-a-dictator/a-15335165> diakses pada 18 Oktober 2015 Pukul 23:51

4. Sistematika Penulisan

BAB I akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai sejarah Uni Afrika, demokrasi, keamanan, struktur organisasi yang meliputi organ-organ di Uni Afrika, dan keanggotaan Uni Afrika.

BAB III akan membahas mengenai poin pertama yaitu dinamika politik yang meliputi geografi, sejarah, populasi penduduk, sistem politik, pembagian administratif, ekonomi, dan militer. Poin kedua di bab ini akan membahas mengenai dinamika konflik di Libya yang meliputi deskripsi Konflik Libya 2011, Kematian Qaddafi, Respon Internasional Terhadap Kematian Qaddafi, dan Prospek Negara Libya Setelah Rezim Qaddafi Berahir.

BAB IV ini akan membahas mengenai langkah- langkah Uni Afrika menyelesaikan konflik Libya melalui pertemuan Roadmap dan diimplementasikan tanpa menggunakan intervensi militer, dengan salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan identitas dan pengakuan NTC, juga peran *The African Union Observer Mission* dalam perubahan institusi di Libya.

BAB V akan membahas mengenai kesimpulan.

